

**PENERAPAN HUKUM ACARA DALAM PENANGANAN PELANGGARAN KODE  
ETIK PENYELENGGARA PEMILU OLEH DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2019**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**TAHUN 2021**

# PENERAPAN HUKUM ACARA DALAM PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2019

Eka Novriadi, NIM 1820112041, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas  
Hukum Universitas Andalas, 2021, 149 halaman.

## ABSTRAK

Untuk menjaga agar pemilu diselenggarakan secara profesional dan proporsional, penegakan kode etik penyelenggara pemilu menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan. Secara normatif, penegakan kode etik melalui mekanisme persidangan secara terbuka dimaksudkan agar penegakan kode etik dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan menganut prinsip-prinsip peradilan modern. Kebijakan hukum penanganan pelanggaran kode etik melalui mekanisme persidangan terbuka telah diadopsi oleh undang-undang pemilu semenjak pemilu sebelumnya. Hanya saja, penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masih dinilai mengalami berbagai persoalan dalam penegakannya, baik dari sisi penentuan *subjectum litis*, *objectum litis*, penerapan hukum acara sidang kode etik, hingga penetapan putusan oleh DKPP. Akibat ketidakpuasan terhadap performa DKPP tersebut, dalam perjalanannya beberapa Putusan DKPP diuji ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga turut berdampak terhadap profesionalitas dan proporsionalitas serta marwah DKPP sebagai lembaga penegak etik. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini akan menjawab dua permasalahan, yaitu : (1) Bagaimanakah penerapan hukum acara penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada pemilu tahun 2019? (2) Bagaimanakah sifat putusan DKPP dalam memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada pemilu tahun 2019?. Oleh karena masalah penelitian ini merupakan gejala normatif, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum yang bersifat doktrin. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini berkesimpulan, pertama, penerapan hukum acara dalam penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP dalam memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada pemilihan umum tahun 2019 cenderung dilakukan secara tidak konsisten. Inkonsistensi tersebut terlihat dalam dua praktik, yaitu adanya perbedaan penerapan hukum acara pada satu perkara dengan perkara lainnya, dan adanya perbedaan antara pengaturan dalam hukum acara dengan apa yang diterapkan oleh DKPP dalam praktiknya. Kedua, sifat final dan mengikat Putusan DKPP adalah final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu sebagai pelaksana Putusan DKPP secara administratif, sebab dalam struktur kelembagaan negara DKPP hanya lembaga Tata Usaha Negara. Implikasinya, Putusan DKPP dapat diuji melalui peradilan Tata Usaha Negara. Meski demikian, pengujian Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat tersebut dianggap sebagai objek pelanggaran kode etik baru. Sebab pengaturan perihal mekanisme banding atau koreksi terhadap putusan DKPP sebagai peradilan etik pertama dan terakhir belum diatur dalam undang - undang pemilu.

**Kata Kunci:** Kode Etik, Hukum Acara, DKPP, Pemilu

# APPLICATION OF PROCEDURE LAW IN HANDLING VIOLATIONS OF THE CODE OF CONDUCT OF ELECTION ADMINISTRATION BY THE ELECTION ORGANIZING HONORARY COUNCIL IN THE 2019 ELECTION

**Eka Novriadi, NIM 1820112041, Master of Law Study Program,**  
Postgraduate Faculty Of Law, Andalas University, 2021, 149 Pages

## ABSTRACT

The enforcement of code of ethics for election administrators is one way to make sure that elections are held professionally and proportionally. Normatively, the enforcement of the code of ethics through an open trial mechanism is intended that the enforcement of the code of ethics can be carried out in a transparent and accountable manner by adhering to the principles of modern justice. The legal policy for handling violations of the code of ethics through the open trial mechanism has been adopted by the election law since the previous election. However, the enforcement of the code of ethics by the Election Organizing Honorary Council (DKPP) is still considered to have various problems in its enforcement, both in terms of determining *subjectum litis*, *objectum litis*, implementation of the code of ethics trial procedure, and the determination of decisions. As a result of dissatisfaction with the performance of DKPP, in the course of which several DKPP decisions were tested to the State Administrative Court, so that they also had an impact on the professionalism and proportionality as well as the dignity of DKPP as an ethics enforcement agency. In connection with this, this study will answer two problems, namely: (1) What is the procedural law for violations of the election organizers' code of ethics applied by the election organizers' honorary council? (2) What is the nature of DKPP's decision in deciding violations of the code of ethics for election organizers? Because this research problem is a normative phenomenon, the type of research used is normative legal research or doctrinal legal research. This study uses primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of legal materials is carried out using a statutory approach and a case approach. This study concludes, *firstly*, the application of procedural law in handling violations of the electoral code of ethics by DKPP in examining and deciding cases of violations of the electoral code of ethics in the 2019 general election tends to be inconsistent. This inconsistency is seen in two practices, namely the difference in the application of procedural law in case to case, and the difference between the arrangements in procedural law and what is applied by DKPP in practice. *Second*, the final and binding nature of DKPP decision is final and binding on the President, KPU, Provincial KPU, Regency/Municipal KPU, and Bawaslu as the administrative executor of the DKPP decision, because in the state institutional structure, DKPP is only a State Administrative institution. The implication is that DKPP's decision can be tested through the State Administrative Court. However, the examination of DKPP decision which is final and binding is considered an object of the new violation of code of ethics. Consequently, the regulation regarding the mechanism of appeal or correction of DKPP decision as the first and last ethical court has not been regulated in the election law.

**Keywords: Code of Ethics, Procedural Law, DKPP, Elections**